

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL DI PROVINSI ACEH

Eli Wardani¹⁾, Syarifah Syafira²⁾, Ratna³⁾, Saharuddin⁴⁾
^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh
¹eli.190430025@mhs.unimal.ac.id

Corresponding Author: ²syarifahsyafira@unimal.ac.id

ABSTRACT

The study aims to analyze fiscal decentralization, unemployment and the human development index against regional income disparity in the province of Aceh. The data used in this study is the time series and section cross 2017-2021 obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of 23 Regencies/ Cities of Aceh province. This research uses a panel data regression analysis method with a Random Effect Model (REM) approach. The results of the partial analysis in this study state that DAU has a negative and significant effect on income disparities, DAK and Unemployment has a positive and significant effect on income disparities, DBH has no and insignificant effect on income disparities, and HDI has a negative and insignificant effect on income disparities.

Keywords: *income disparity, fiscal decentralization, unemployment and human development index*

ABSTRAK

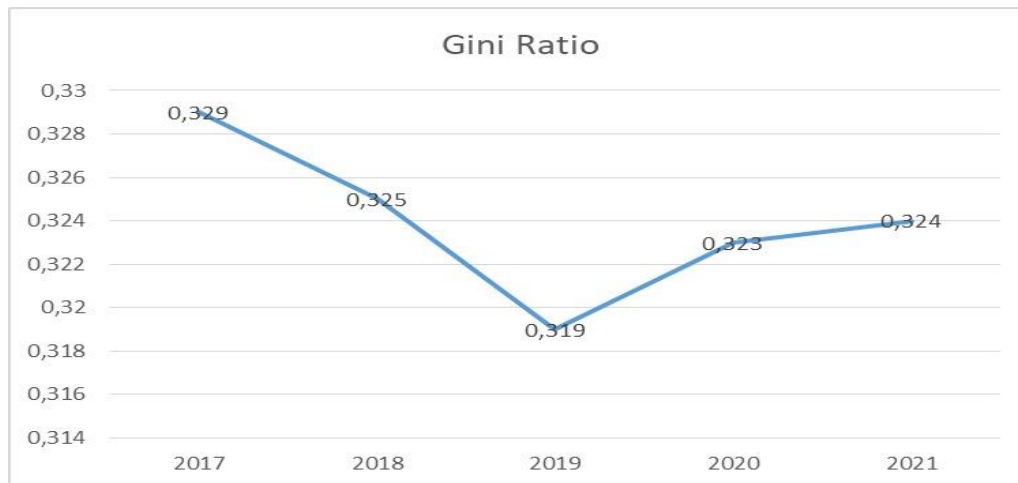
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desentralisasi fiskal, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap disparitas pendapatan regional di provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dan cross section tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 23 Kabupaten/Kota provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM). Hasil analisis secara parsial dalam penelitian ini menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, DBH tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, dan IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan.

Kata Kunci: Disparitas Pendapatan, Desentralisasi Fiskal, Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan tercapainya kestabilan ekonomi melalui berbagai perubahan atau transformasi. Ketimpangan yang tinggi antar wilayah dapat membawa dampak yang buruk terhadap kestabilan ekonomi dan kestabilan politik suatu negara. Oleh karena itu perlu diupayakan berbagai kebijakan agar ketimpangan yang terjadi antar wilayah tidak terlalu mencolok (Anshari dan Ariusni, 2019). Karena variasi sumber daya yang tersedia dan kecepatan upaya pembangunan daerah yang dilakukan, akan selalu ada kesenjangan antar wilayah.

Menurut Irwanto & Noviandari dalam Astuti (2023), pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya daerah yang sangat maju dan daerah yang kurang berkembang. Tempat-tempat dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya sehingga membuat mereka lebih kaya secara proporsional dibandingkan dengan daerah-daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang rendah.



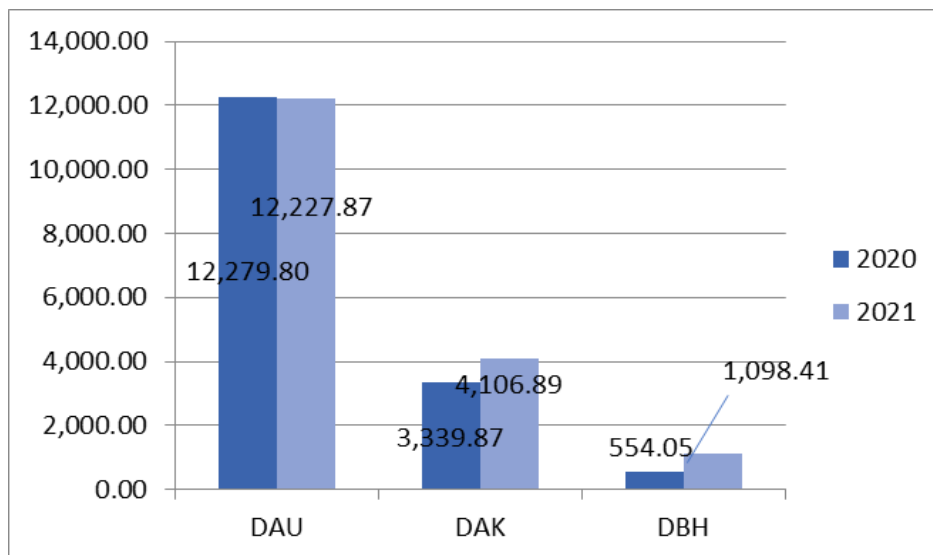
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1
Gini Ratio Menurut Provinsi Di Aceh Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 1 dimana kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh yang di hitung dengan rasio gini selama jangka waktu lima tahun terakhir. Gini ratio yang tertinggi 2017 sebesar 0.329 dan nilai gini ratio terendah pada tahun 2019 sebesar 0,319. Aceh menempati urutan ke-12 rasio Gini terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia. Berdasarkan daerah, rasio Gini di daerah perkotaan lebih tinggi daripada rasio Gini di daerah perdesaan.

Kesenjangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota seprovinsi Aceh mengalami perubahan yang signifikan sejak awal pandemi terjadi, walaupun peningkatan kesenjangan distribusi pendapatan yang terjadi di masa pandemi masih tergolong rendah. Karena setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah, maka untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah.

Untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, Indonesia memulai desentralisasi politik, administrasi dan fiskal pada tahun 2001. Desentralisasi adalah proses pendelegasian tanggung jawab dan wewenang level atas ke level bawah (Trisnaningsih & Ariadi, 2022). Grand design desentralisasi fiskal Indonesia telah dirumuskan untuk implementasi desentralisasi fiskal (Puspita et al., 2021). Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus ditinjau sebagai suatu sistem yang menyeluruh. Kondisi minimal yang diperlukan oleh daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, misalnya pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang cukup untuk menghimpun penerimaan dan pengeluaran.



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 2

Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2020-2021 (Triliun Rupiah)

Berdasarkan Gambar 2 Dana Transfer Umum dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum di Provinsi Aceh yang dialokasikan pada tahun 2021 sebesar Rp15,08 triliun, mengalami penurunan sebesar 2,41 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dilihat pada 2019 DAU mengalami realisasi maksimal sebesar 100 persen, namun pada tahun 2020 sebesar 99,45 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 DAU tidak terjadi penyerapan anggaran yang maksimal akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 DAU dapat diserap secara maksimal sebesar 100 persen.

Alokasi DBH tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp108,31 miliar atau 9,50 persen dibandingkan tahun 2020 telah berimplikasi pada penurunan realisasi penyaluran DBH secara nominal. Realisasi penyaluran DBH sebesar Rp1,03 triliun atau 99,91 persen dari pagu alokasi DBH, menurun Rp107,70 miliar jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 yang mencapai Rp1,14 triliun atau 99,87 persen. Namun secara persentase penyerapan DBH lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

Selain itu tingkat pengangguran juga mempunyai peran penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Peningkatan pengangguran memiliki dampak yang memberatkan pada ketimpangan pendapatan (Cysne & Turchick, 2012) Oleh sebab itu, dengan mengurangi pengangguran, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat dikurangi. Terlalu banyak pengangguran dapat menurunkan upah untuk pekerja pada kelompok berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan (Sukirno, 2011). Menurut Pi & Zhang (2018) jika tingkat pengangguran dalam sektor keterampilan di perkotaan lebih tinggi dari satu, ketimpangan pendapatan akan semakin parah. Efriza (2014) juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berkorelasi positif dengan pengangguran.



Sumber: Badan pusat statistik (2023)

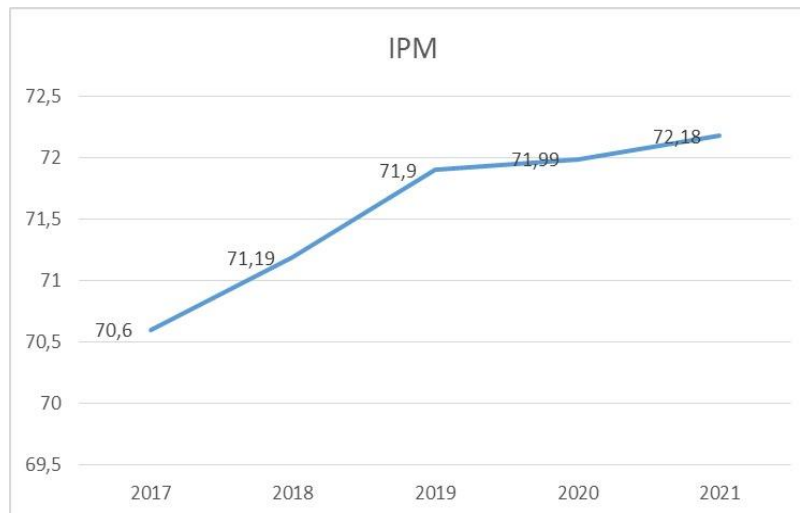
Gambar 3

Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi Di Aceh Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan persentase tingkat pengangguran terbuka di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2017-2021. Pengangguran tertinggi berada pada tahun 2020 sebesar 6,59 persen dan pengangguran terendah berada pada tahun 2019 sebesar 6,17 persen. Meski mengalami penurunan secara jumlah, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2021 masih berada pada angka 6,30 persen, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode Februari 2021. Hal tersebut disebabkan oleh turunya angkatan kerja sebanyak 29 ribu orang.

Ketimpangan wilayah juga disebabkan karena adanya perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar wilayah. Kondisi demografis dalam suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Produktivitas kerja masyarakat dalam suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi demografis. Kondisi demografis yang baik cenderung meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu pada bidang kesehatan berupa umur harapan hidup, pendidikan berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak. Semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk sehingga tingkat pendapatan akan semakin tinggi, sebaliknya jika IPM rendah maka produktivitas akan rendah dan akan berpengaruh pada pendapatan. Tingkat IPM yang berbeda di setiap daerah membuat IPM dapat dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 4
IPM Menurut Kab/kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 4 di atas Menunjukkan bahwa 5 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal *Human Development Index (HDI)*. Menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya membuat peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa. Adanya peningkatan produktivitas berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga ketimpangan akan menurun.

Dengan adanya pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadikan semakin bervariasinya perkembangan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia yang berbeda antar daerah, alhasil akan menyebabkan ketimpangan dan perbedaan pendapatan antar daerah tersebut. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi yang terdiri dari tiga unsur pokok antara lain ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya insani dan stok modal (Sukirno, 2011). Desentralisasi fiskal, pengangguran dan *human capital* menjadi suatu hal yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh”**.

METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka-angka yang bersifat sistematis, dan terukur. Dalam penelitian ini ditunjukkan selama periode 2017-2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersifat kuantitatif. Data sekunder meliputi semua data yang dikumpulkan melalui kajian literature, baik berupa majalah, jurnal, atau artikel, atau dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Sehubungan dengan pokok pembahasan, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang diakses melalui <https://aceh.bps.go.id> dan <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>.

Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik pengkajian kepustakaan untuk mengumpulkan data melalui bahan pustaka mencakup artikel ilmiah, jurnal, artikel, dan laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji.

Metode Analisis Data

Common Effect Model (CEM)

Metode CEM berasumsi bahwa berbagai objek memiliki perilaku yang sama, sehingga tidak dapat mengamati perbedaan waktu dan objek atau dengan kata lain intersep dan slope pada metode CEM diasumsikan sama.

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + e_{it}$$

Fixed Effect Model (FEM)

Metode estimasi ini mengasumsikan bahwa setiap objek memiliki intersep yang berbeda tetapi memiliki koefisien yang sama. Untuk membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya maka digunakan variabel *dummy* atau variabel semu sehingga metode ini juga disebut *Least Square Dummy Variables (LSDV)*. Persamaan model menurut Baltagi, (2005) sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \sum_{z=1}^u \beta X_{it} + \mu_{it}$$

Random Effect Model (REM)

REM memperhitungkan error dari data panel dengan menggunakan metode *least square*. Pendekatan model ini memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan error dari *cross-section* dan *time series*.

$$Y_{it} = \alpha + \sum_{z=1}^u \beta X_{it} + V_{it}$$

Penentuan Model Estimasi

Uji Chow

Uji Chow digunakan dalam regresi data panel untuk menentukan apakah pendekatan *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang lebih cocok. Berikut ini adalah hipotesis pada uji Chow:

- a. H_0 : *Common Effect Model (restricted)*
Model common effect terpilih apabila nilai F lebih besar dibandingkan $\alpha = 5\%$.
- b. H_1 : *Fixed Effect Model (unrestricted)*
Model fixed effect terpilih apabila nilai F lebih kecil dibandingkan $\alpha = 5\%$.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengevaluasi apakah dan dua model estimasi data panel, yaitu *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*, adalah yang terbaik dan paling tepat Menurut Judge dalam Gujarati dan Porter (2012) faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan

ketika memutuskan teknik. mana yang akan digunakan dalam perkinan data panel (FEM at REM)

Hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a. H_0 = *Model random effect* terpilih apabila nilai Chi-Squarenya lebih besar dibandingkan $\alpha = 5\%$.
- b. H_1 = *Model fixed effect* terpilih apabila nilai Chi-Squarenya lebih kecil dibandingkan $\alpha = 5\%$.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier juga dikenal sebagai uji LM adalah pengujian untuk pemilihan model terbaik *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Adapun ketentuan untuk pengujian Lagrange Multiplier sebagai berikut :

- a. Uji LM ini didasarkan pada probability Breusch-Pagan, jika nilai probability Breusch-Pagan kurang dari nilai $\alpha < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan sebaliknya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam analisis regresi dilakukan untuk menguji apakah data yang akan diteliti memiliki variabel pengganggu yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini digunakan statistic pengujian *Jarque-Bera* yang terdapat dalam program *Eviews*. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari nilai Alpha ($p > \alpha$) maka data tersebut berdistribusi normal sedangkan jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai Alpha ($p < \alpha$) maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Multikolinearitas muncul jika diantara variabel independen memiliki korelasi yang tinggi dan membuat kita sulit untuk memisahkan efek suatu variabel independen terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Hal ini disebabkan perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan variabel pasangannya karena korelasi yang tinggi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji *White heteroskedasticity cross term* melalui alat bantu *software Eviews10*. Apabila nilai probabilitasnya *obs chi square* > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Chow

Tabel 1
Hasil Pengujian Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.628689	(22,87)	0.0000
Cross-section Chi-square	113.206629	22	0.0000

Sumber: Hasil Penelitian (Eviews, 2023)

Berdasarkan uji chow di atas, kedua nilai probabilitas *Cross Section F* dan *Chi Square* sebesar 0.0000 lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menunjukkan *Fixed effect model* yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan *metode fixed effect*. Berdasarkan hasil uji chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke uji *hausman*.

Hasil Uji Hausman

Tabel 2
Hasil Pengujian Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.469292	5	0.9166

Sumber: Hasil Penelitian (Eviews, 2023)

Berdasarkan Uji *Hausman* diatas menunjukkan nilai probabilitas *cross section random* sebesar 0.9166 lebih tinggi dari alpha 5% ($0.9166 > 0,05$) maka model *random effect* yang dinyatakan terbaik.

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 3
Hasil Pengujian LM

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 10/09/23 Time: 22:10
Sample: 2017 2021
Total panel observations: 115
Probability in

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	63.31927 (0.0000)	1.729183 (0.1885)	65.04845 (0.0000)

Sumber : Hasil penelitian (Eviews, 2023)

Berdasarkan Tabel 3 di atas dengan pendekatan *Breusch-pagan* terlihat bahwa nilai probabilitas both lebih kecil dari alpha 5% yaitu ($0.0000 > 0.05$), maka dari hasil pengujian model estimasi yang tepat digunakan di dalam penelitian ini adalah model estimasi dengan jenis *random effect model*.

Hasil Random Effect Model

Tabel 4
Hasil Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LND AU	-0.054108	0.023452	-2.307127	0.0229
LND AK	0.021875	0.010398	2.103769	0.0377
LND BH	0.002924	0.002868	1.019603	0.3102
PENGANGGURAN	0.004547	0.001762	2.580544	0.0112
IPM	-0.000162	0.001167	-0.139103	0.8896
C	0.495000	0.152217	3.251930	0.0015

Sumber: Hasil Penelitian (Eviews, 2023)

Berdasarkan Tabel di atas, maka persamaan regresi yang dapat disusun di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$GR_{it} = 0.495 - 0.054LND AU_{it} + 0.022LND AK_{it} + 0.003LND BH_{it} + 0.005PGR_{it} - 0.0002IPM_{it}$$

Konstanta sebesar 0.495 artinya apabila variabel Desentralisasi Fiskal, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia bernilai konstan maka Disparitas Pendapatan di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh akan meningkat sebesar 0.495 persen.

Nilai koefisien DAU sebesar -0.054 artinya apabila DAU meningkat sebesar 1 persen maka Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh akan menurun sebesar 0.05 persen dengan asumsi variabel DAK, DBH, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia dianggap konstan/tetap.

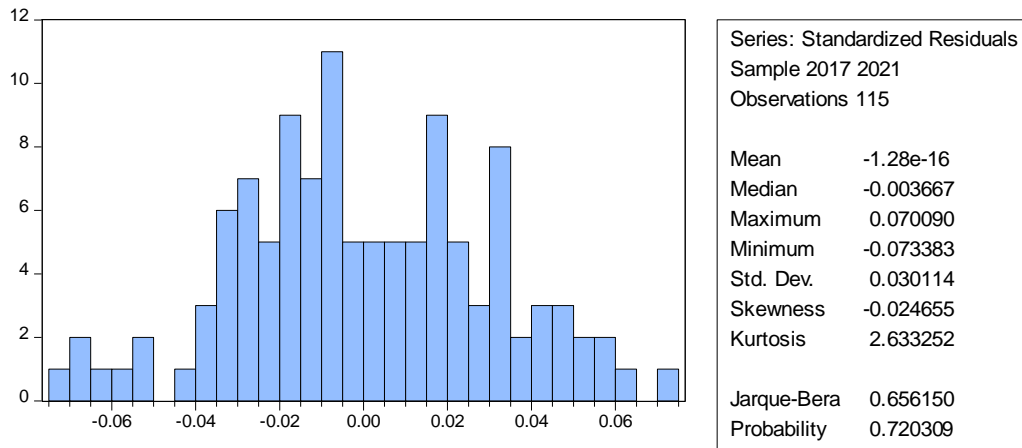
Nilai koefisien DAK sebesar 0.022 artinya apabila DAK mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh akan meningkat sebesar 0.02 persen dengan asumsi variabel DAU, DBH, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia dianggap konstan/tetap.

Nilai koefisien DBH sebesar 0.003 artinya apabila DBH mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh akan meningkat sebesar 0.003 persen dengan asumsi variabel DAU, DAK, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia dianggap konstan/tetap.

Nilai koefisien Pengangguran sebesar 0.005 artinya apabila Pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh akan meningkat sebesar 0.005 persen dengan asumsi variabel DAU, DAK, DBH, dan Indeks Pembangunan Manusia dianggap konstan/tetap.

Nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0.0002 artinya apabila Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 1 persen maka Disparitas Pendapatan di Provinsi Aceh akan menurun sebesar 0.0001 persen dengan asumsi variabel DAU, DAK, DBH, dan Pengangguran dianggap konstan/tetap.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Gambar 5
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas menunjukkan nilai prob JB > 0,05 yaitu sebesar 0,720309 > 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Jika nilai koefisien kerelasi pasrsial variabel lebih besar dari 0,80 maka terjadi gejala multikolinearitas, begitu sebaliknya. Berdasarkan pengujian normalitas dapat diketahui:

1. DAU dengan DAK sebesar $0.80 < 0.80$, menandakan tidak ada indikasi multikolonaeritas.
2. DAU dengan DBH $0.40 < 0.80$, hal ini menandakan tidak ada indikasi multikolonaeritas.
3. DAU dengan Pengangguran $0.24 < 0.80$, menandakan tidak ada indikasi multikolonaeritas.
4. DAU dengan IPM $0.03 < 0.80$ menandakan tidak ada indikasi multikolonaeritas.
5. DAK dengan DBH $0.34 < 0.80$ menandakan tidak ada indikasi multikolonaeritas.
6. DAK dengan Pengangguran $0.12 < 0.80$, menandakan tidak ada indikasi multikolonaeritas.
7. DAK dengan IPM $-0.11 < 0.80$, menandakan tidak ada indikasi multikolonaeritas.
8. DBH dengan Pengangguran $-0.40 < 0.80$, menandakan tidak ada indikasi multikolonaeritas.
9. Pengangguran dengan IPM $0.25 < 0.80$, menandakan tidak ada indikasi multikolonaeritas.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Parsial

Uji Parsial dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara individu antara variabel independen terhadap Variabel Dependen. Ketentuan uji t yaitu dengan melihat nilai t tabel dengan t statistik. Apabila nilai t statistik $>$ t tabel, maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara mendapatkan t tabel : $(n-k) = 115-6 = 109$.

Diperoleh nilai t hitung Desentralisasi Fiskal (DAU) memiliki nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $(-2.307127 > 1.98197)$ dan nilai Probalitas pada taraf nyata 5% sebesar $(0.0229 < 0,05)$ Maka tolak H_0 terima H_1 yang artinya variabel Desentralisasi Fiskal (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Disparitas pendapatan di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Desentralisasi Fiskal (DAK) memiliki nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $(2.103769 > 1.98197)$ dan nilai Probalitas pada taraf nyata 5% sebesar $(0.0377 < 0,05)$ Maka tolak H_0 terima H_1 yang artinya variabel Desentralisasi Fiskal (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disparitas pendapatan di Provinsi Aceh.

Desentralisasi Fiskal (DBH) memiliki nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $(1.019603 < 1.98197)$ dan nilai Probalitas pada taraf nyata 5% sebesar $(0.3102 > 0,10)$ Maka tolak H_0 terima H_1 yang artinya variabel Desentralisasi Fiskal (DBH) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Disparitas pendapatan di Provinsi Aceh.

Pengangguran memiliki nilai t hitung $<$ t tabel yaitu $(2.580544 > 1.98197)$ dan nilai Probalitas pada taraf nyata 5% sebesar $(0.0112 < 0,05)$ Maka tolak H_0 terima H_2 artinya variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disparitas pendapatan di Provinsi Aceh.

IPM memiliki nilai t hitung $<$ t tabel yaitu $(-0.139103 < 1.98197)$ dan nilai Probalitas pada taraf nyata 5% sebesar $(0.8896 > 0,010)$ Maka terima H_0 tolak H_3 artinya variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Aceh.

Hasil Uji Simultan

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Independen (Desentralisasi fiskal, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia) secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Disparitas Pendapatan) yaitu dengan melihat nilai F statistik. Apabila nilai F statistik $>$ Ftabel dengan tingkat probabilitas maka secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Cara mendapatkan f tabel $(k-1) (n-k) = (6-1) (115-6) = (5) (109)$, hasilnya pada 2.30.

Nilai F statistik $>$ Ftabel yaitu $2.896785 > 2.30$ dengan probabilitas sebesar $0.017045 < 0.05$, maka dapat disimpulkan secara serentak variabel Desentralisasi Fiskal, Pengangguran dan IPM pada 23 kabupaten/kota berpengaruh secara signifikan terhadap Disparitas Pendapatan di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hal ini juga bisa dilihat dari probabilitas sebesar $0,017045 < 0,01$.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: Secara parsial DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan di 23 kabupaten/kota provinsi Aceh dengan besarnya pengaruh DAU sebesar - 2.30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya dana DAU maka disparitas pendapatan akan menurun. Secara parsial DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan di 23 kabupaten/kota provinsi Aceh dengan besarnya pengaruh DAK

sebesar 2.10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya dana DAK maka disparitas pendapatan juga meningkat.

Secara parsial DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di 23 kabupaten/kota provinsi Aceh.

Secara parsial pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh dengan besarnya pengaruh yaitu sebesar 2.58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengangguran meningkat maka disparitas pendapatan juga meningkat. Secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 23 kabupaten/kota provinsi Aceh. Secara simultan desentralisasi fiskal, pengangguran, dan IPM berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di 23 kabupaten/kota provinsi Aceh, dengan besarnya pengaruh yaitu sebesar 2.89 persen.

Adapun saran yang dapat di berikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi pemerintah, Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal harus telaksana dengan baik agar dapat tercapai tujuan utama yaitu pemerataan atau penurunan ketimpangan pendapatan antar daerah, untuk itu pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan suatu daerah. Diharapkan melakukan intervensi dari pemerintah dengan mendistribusikan pendapatan ke masyarakat golongan menengah bawah, bahwa dana yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga terciptanya lapangan pekerjaan yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan antar daerah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya nilainya yang tinggi tetapi juga secara merata dan dapat mengembangkan sektor – sektor yang ada pada daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan antar daerah satu dengan daerah lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi instansi-instansi yang terkait agar dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebijakan apa yang paling berperan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai *human capital investment* sehingga kualitas sumber daya manusia semakin baik dan tetap memperhatikan nilai Indeks Pembangunan Manusia supaya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi Disparitas pendapatan khususnya di 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang sejenis, sebaiknya melibatkan variabel yang lebih bervariasi baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya. Data *time series* waktu penelitiannya ditambah agar lebih valid serta dapat menggunakan metode penelitian seperti model dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494-502.
- Cysne, R. P., & Turchick, D. (2012). Equilibrium unemployment-inequality correlation. *Journal of Macroeconomics*, 34(2), 454-469.
- Irwanto, & Noviandari, I. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 13(1), 110-118.

- Luthfi Ari Suhanda. (2020). Pengaruh Alokasi Dana Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. P. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255–285.
- Reform, L., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Christia, A. M., Ispriyarso, B., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia. 15.
- Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 71–81.
- Sadono Sukirno. (2011). *Makro Ekonomi Pengantar*. PT. Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Pengantar*. Todaro, Michael P. (2011). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, Michael P. (2011). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Trisnaningsih, S., & Ariadi, D. (2022). Literature Review : Decentralization Analysis in Improving Managerial Performance. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 02(5), 884–888.
- Ulfie Efriza. (2014). Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, 1(1).
- UNDP. 2008. *The Economics Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Published Jointly by BPS-Statistic Indonesia.
- Wandira Gugus Abrie. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 44–51.